Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, Fax. (0778) 461349
Website : batam.go.id, Website Kominfo : kominfo.batam.go.id
email : kominfo@batam.go.id
BATAM
Kode Pos : 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
Nomor : KPTS.54/KOMINFO/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2017-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;

b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
21. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapann Renstra OPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 05 Januari 2020

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM

AZRIL APRIANSYAH, S.T., M.T.
Pembina
NIP.19730408 200212 1 005

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	PENANGGUNGJAWAB
3.	KASUB.BAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	SEKRETARIS
I	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**	
NO.	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1	KABID. KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	KOORDINATOR
2.	KASI. KEMITRAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	ANGGOTA
3.	KASI. PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	ANGGOTA
4.	KASI. LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	ANGGOTA

II	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**	
NO.	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1	KABID. PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	KOORDINATOR
2.	KASI. TATA KELOLA E-GOVERNMENT	ANGGOTA
3.	KASI. PENGEMBANGAN APLIKASI	ANGGOTA
4.	KASI. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	ANGGOTA
III	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG STATISTIK**	
1	KABID. STATISTIK	KOORDINATOR
2	KASI PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL	ANGGOTA
3	KASI. ANALISIS DAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL	ANGGOTA
4	KASI. KERJASAMA DAN PENERANGAN STATISTIK SEKTORAL	ANGGOTA
IV	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERSANDIAN**	
1	KABID. PERSANDIAN	KOORDINATOR
2	KASI. OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN	ANGGOTA
3	KASI. TATA KELOLA PERSANDIAN	ANGGOTA
4	KASI. PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	ANGGOTA

V	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT	
	JABATAN	**JABATAN DALAM TIM**
1	KASUB.BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOORDINATOR
2	KASUB. BAG. KEUANGAN	ANGGOTA
3	PELAKSANAAN SUB.BAG. PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA

Batam, 05 Januari 2020
KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM

AZRIL APRIANSYAH, S.T., M.T.
Pembina, NIP. 19730408 200212 1 005

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-NYA, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA. 2021 disusun mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Periode 2016-2021 juga memperhatikan hasil evaluasi dari program kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019-2020. Sehingga Perubahan Renja ini merupakan kumpulan dari rumusan tujuan OPD yang hendak dicapai pada TA. 2021.

Penyusunan Perubahan Renja (P-Renja) Tahun 2021 ini adalah pencapaian di tahun kelima dari pelaksanaan Renstra 2016-2021. Selain itu, dokumen P-Renja disusun dalam rangka memberikan panduan bagi OPD dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, dengan demikian semua program kegiatan OPD dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kualitas penyusunan P-Renja OPD akan sangat ditentukan dari kemampuan seluruh ASN OPD dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan dokumen Renja tersebut. Selanjutnya tak kalah penting diperlukan pemantauan, evaluasi dan reviu secara berkala terhadap pelaksanaannya guna peningkatan kinerja organisasi dan mutu pelayanan informasi bagi masyarakat.

Batam, 09 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM

AZRIL APRIANSYAH, ST, MT
NIP. 19730408 200212 1 005

DAFTAR ISI

Kata pengantar			i
Daftar isi			ii
BAB	I	PENDAHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang	2
	1.2.	Landasan Hukum	3
	1.3.	Maksud dan tujuan	4
	1.4.	Sistematika penulisan	5
BAB	II	EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2021	
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II 2021 Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.	6
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Daerah	24
	2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
	2.4.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB	IV	PENUTUP	37

LAMPIRAN

- ✓ Rekapitulasi Daftar Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Tahun 2021
- ✓ Hasil Pemetaan Kegiatan (Belanja Langsung) Tahun 2021 ke dalam Permendagri No. 90 Tahun 20219
- ✓ Rekap Hasil Pemetaan Indikator Program RPJMD Kota Batam dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019
- ✓ Form E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Batam
- ✓ Tabel 5.2.01 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan selanjutnya menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021. Dengan demikian lebih memudahkan bagi OPD dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya, dan mentargetkan capaian kinerja pada Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja untuk perencanaan pembangunan tahunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peranturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD Kota sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Prakiraan Maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu Indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam juga mengikuti point-point penting yang terdapat pada RKPD Kota Batam. Penetapan program prioritas

berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dilaksanakn oleh Pemerintah Kota Batam dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja OPD harus mempunyai keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di Tahun 2021 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, maupun usulan OPD terkait melalui forum OPD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD selain guna mencapai tujuan dan sasaran OPD juga diharapkan dapat mewujudkan cita-cita OPD yakni VISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yaitu: *"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis TIK yang Terintegrasi dan Mudah diakses Masyarakat"* .

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam.

3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2021.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021.
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
13. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Renstra OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk periode perubahan dalam tahun ini, sebagai

implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman:

1. pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2022.
2. monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
3. penyusunan rencana anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

1.4. Sistematika Dokumen Renja

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II 2021 Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA BATAM
TAHUN 2021

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Diskominfo Kota Batam Tahun 2020, didasarkan pada Renstra Diskominfo Kota Batam Tahun 2016-2021, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021.

Jumlah Pagu APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, sebesar Rp 19.504.764.666,00 yang terdiri dari:

Belanja Operasi	: Rp 18.952.816.166,00
Terdiri dari:	
Belanja Pegawai	: Rp 7.231.580.546,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp 11.721.235.620,00
Belanja Modal	: Rp 551.948.500,00

dengan realisasi anggaran belanja hingga Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp 7.899.348.001,00 atau sebesar 40,50%.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tahun Anggaran 2021 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Diskominfo digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Diskominfo dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan

kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dari 6 (enam) Program Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan, hanya 5 (lima) Program Renstra yang teranggarkan di Tahun 2021, serta ada 10 (sepuluh) Kegiatan yang telah dianggarkan dengan capaian Indikator kegiatan rata-rata diatas 90%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 yang mengacu pada sasaran RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 atau TC.29

EVALUASI HASIL RKPD KOTA BATAM SEMESTER I TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

No	JUMLAH PROGRAM RPJMD	RKPD 2021			APBD 2021			
		TOTAL PAGU	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	TOTAL PAGU	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	6	32.861.814.899,00	6	13	19.504.764.666,00	5	9	21

Tabel 2.2

Capaian evaluasi Kinerja Hasil RKPD per Urusan periode Triwulan II Tahun 2021

No.	Urusan	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Program RKPD	Jumlah Program APBD	Capaian Kinerja Hasil	
					%	Kategori
1.	Komunikasi dan Informatika	2	2	2	41,77%	Tinggi
2.	Statistik	1	1	1	1.96%	Sangat Rendah
3	Persandian	1	1	0	0%	Sangat Rendah

Table: REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PERIODE TRIWULAN II TA. 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PENUNJANG/PAKET		NILAI PAGU (Rp)	TARGET				REALISASI			
				KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK	
	KODE	NAMA		Rp.	(%)	VOL	(%)	Rp.	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
I	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.408.349.826,00**	**3.117.782.056,00**	**37,08%**	**5579**	**37,57%**	**3.102.132.367,00**	**36,89%**	**37,85%**	
	02.16.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.237.010.546,00**	**2.677.307.559,00**	**36,99%**	**625**	**36,99%**	**2.677.307.559,00**	**36,99%**	**36,99%**	
	02.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.185.740.546,00	2.652.851.059,00	36,92%	106	36,92%	2.652.851.059,00	36,92%	36,92%	
	02.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.270.000,00	24.456.500,00	47,70%	519	47,70%	24.456.500,00	47,70%	47,70%	
	02.16.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**622.771.300,00**	**165.667.497,00**	**26,60%**	**4879**	**26,60%**	**165.667.497,00**	**26,60%**	**32,86%**	
	02.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.368.300,00	3.184.150,00	50,00%	177	100,00%	3.184.150,00	50,00%	50,28%	
	02.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.916.000,00	65.023.500,00	70,74%	835	70,77%	65.023.500,00	70,74%	70,77%	
	02.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.980.000,00	25.815.000,00	23,47%	3036	23,47%	25.815.000,00	23,47%	23,47%	
	02.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.050.000,00	21.050.000,00	100,00%	815	100,00%	21.050.000,00	100%	100%	
	02.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.457.000,00	50.594.847,00	12,86%	16	12,86%	50.594.847,00	12,86%	12,86%	
	02.16.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**286.763.500,00**	**145.470.000,00**	**50,73%**	**23**	**62,16%**	**138.480.000,00**	**48,29%**	**62,16%**	
	02.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00%	12	100,00%	42.000.000,00	92,11%	100%	

	02.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	241.163.500,00	99.870.000,00	41,41%	11	55,00%	96.480.000,00	40,01%	55,00%
	02.16.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**104.072.480,00**	**54.761.000,00**	**52,62%**	**19**	**52,61%**	**46.556.311,00**	**44,73%**	**52,61%**
	02.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.214.000,00	9.611.000,00	50,02%	6	50,00%	1.496.113,00	7,79%	50,00%
	02.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.858.480,00	45.150.000,00	53,21%	13	53,21%	45.060.198,00	53,10%	53,21%
	02.16.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**157.732.000,00**	**74.576.000,00**	**47,28%**	**33**	**50,64%**	**74.121.000,00**	**46,99%**	**50,64%**
	02.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	87.142.000,00	37.431.000,00	42,95%	2	42,95%	36.976.000,00	42,43%	42,95%
	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua								
	02.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.590.000,00	37.145.000,00	52,62%	31	60,13%	37.145.000,00	52,62%	60,13%
II	**02.16.02**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**6.722.335.840,00**	**3.151.847.212,00**	**46,89%**	**4459**	**47,81%**	**3.094.744.821,00**	**46,04%**	**47,81%**
	02.16.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**6.722.335.840,00**	**3.151.847.212,00**	**46,89%**	**4459**	**47,81%**	**3.094.744.821,00**	**46,04%**	**47,81%**
	02.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4.980.223.680,00	2.279.392.212,00	45,77%	688	47,01%	2.274.854.434,00	45,68%	47,01%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								
	02.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	536.692.800,00	285.600.000,00	53,21%	13	53,21%	281.583.160,00	52,47%	53,21%
	02.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	417.464.400,00	215.700.000,00	51,67%	637	51,67%	185.465.928,00	44,43%	51,67%
	02.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	787.954.960,00	371.155.000,00	47,10%	3121	47,10%	352.841.299,00	44,78%	47,10%
III	**02.16.03**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**4.361.049.000,00**	**1.802.586.625,00**	**41,33%**	**19721**	**47,74%**	**1.702.215.813,00**	**39,03%**	**47,74%**

	02.16.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah/Kota**	**2.456.655.000,00**	**1.067.295.000,00**	**43,45%**	**1778**	**56,80%**	**1.028.324.188,00**	**41,86%**	**56,80%**
	02.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.456.655.000,00	1.067.295.000,00	43,45%	1778	56,80%	1.028.324.188,00	41,86%	56,80%
	02.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.904.394.000,00	735.291.625,00	38,61%	17943	36,05%	673.891.625,00	35,39%	36,05%
	02.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	257.994.000,00	7.181.625,00	2,78%	17839	37,30%	7.181.625,00	2,78%	37,30%
	02.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.646.400.000,00	728.110.000,00	44,22%	104	47,95%	666.710.000,00	40,50%	47,95%
IV	**02:20:02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**13.030.000,00**	**255.000,00**	**1,96%**	**17**	**1,96%**	**255.000,00**	**1,96%**	**1,96%**
	02.20.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah di bupaten/Kota**	**13.030.000,00**	**255.000,00**	**1,96%**	**17**	**1,96%**	**255.000,00**	**1,96%**	**1,96%**
	02.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	13.030.000,00	255.000,00	1,96%	17	1,96%	255.000,00	1,96%	1,96%
		T O T A L	**19.504.764.666,00**	**8.072.470.893,00**	**41,39%**	**29776**	**41,39%**	**7.899.348.001,00**	**40,50%**	**43,47%**

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran s.d. Triwulan II Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan daerah dan TIK	1.Persentase data penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik yang terintegrasi	Persen	77 %	72.73 %	94
	2.Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang memanfaatkan teknologi Informasi	Persen	68%	72.73%	100
	3.Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	20%	20 %	100
	4.Nilai Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Level Kabupaten/Kota	Nilai	90	(Menunggu penilaian dari Komisi Informasi Provinsi di akhir tahun 2021)	-
	5.Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan Informasi	Persen	85%	86,4%	100
	6.Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	100%	100%	100

Program	Anggaran		Realisasi	%
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		**19.491.734.666**	**7,899,093,001**	**40,52**
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.408.349.826	3.102.132.367	**36,89**
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	6.722.335.840	3.094.744.821	46,04
3. Program Aplikasi Informasi	Rp	4.361.049.000	1.702.215.813	39,03
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		**13.030.000**	**255.000**	**1.96**
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		13.030.000	255.000	1.96
T O T A L	**Rp**	**19.504.764.666**	**7.899.348.001**	**40,50**

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Tabel: Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Terhadap Target RPJMD

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	TARGET RPJMD 2019	REALISASI RPJMD 2019	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUNAN RPJMD	KET	OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**						
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	B (62.51-81.25)	B (77)	Sesuai Target		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM**
2	**Program Peningkatan, Pemanfaatan Teknologi Informasi**						
		Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan public berbasis online	68 %	68 %	Sesuai Target		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM**
No	**Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan**	**Indikator Program**	**TARGET RPJMD 2019**	**REALISASI RPJMD 2019**	**STATUS CAPAIAN TARGET TAHUNAN RPJMD**	**KETERANGAN**	**OPD PELAKSANA**
STATISTIK							
1	**Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah**						

		Kelengkapan Data SIPD Kota Batam	80 %	80 %	Sesuai Target		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM**
		Jumlah dokumen pendataan pendukung perencanaan	2 dokumen	1 dokumen	Tidak Tercapai	buku yang diterbitkan "Data Statistik Sektoral", sudah mencukupi sebagai dokumen pendataan pendukung perencanaan	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM**
PERSANDIAN							
1	**Program Keamanan Data dan Informasi**						
		Persentase informasi yang berkualifikasi di Pemerintah Kota Batam	25 %	11 %	Tidak Tercapai	Kurangnya sarana persandian dan SDM persandian di OPD Kota Batam	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pembangunan bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik secara online dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian indikator kinerja ***meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur*** melalui kelancaran operasional dan pelaksanaan administrasi kantor Tahun Anggaran 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menganggarkan belanja gaji upah buruh (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 11 orang 12 bulan, belanja peralatan pakai habis 10 paket pekerjaan, belanja premi asuransi kesehatan 11 orang 12 bulan, belanja jasa kantor 4 paket pekerjaan, belanja BBM, belanja pencetakan dan penjilidan dan belanja perjalanan dinas ke luar daerah maupun propinsi untuk mendukung pelaksanaan

tugas-tugas dan pelayanan adminitrasi yakni : melayani surat menyurat kedinasan 942 surat keluar, 219 Nota Dinas, 109 SK Kepala Dinas, 293 Surat Perintah Tugas (SPT) dan 1.587 surat masuk; melayani 25 rapat dan kunjungan studi dari Kementerian/Kab/Kota, melayani permohonan cuti 18 ASN dan penerbitan SKP 32 ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melaksanakan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian indikator kinerja meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur melalui pemeliharaan alat-alat kantor yakni perawatan AC, Komputer dan Mesin fotocopy serta pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4.

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
   a Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dengan capaian Indikator Kinerja :
      - Terlaksananya penerbitan dan penyebarluasan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah, target 112 (12 kliping dan 100 buku) terealisasi 100%;
      - Tersedianya Profil Daerah yang dibuat, target 1 video, terealisasi 100%;
      - Event Pemerintah Kota Batam yang terlaksana, target 4 event, tereal.
   b. Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, dengan capaian indicator kinerja:
      - Terlaksananya publisitas pembangunan daerah, target 2401 terealisasi 2340 atau 97.46%;
      - Terlaksananya diseminasi informasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, target 2401 terealisasi 2340 atau 97.46%;
      - Terlaksananya web OPD yang aktif persemester, target 43 OPD, terealisasi 90.7% atau hanya 4 OPD Kecamatan yang tidak aktif.
   c. Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam, dengan capaian indikator kinerja:

- Jumlah titik CCTV online, target 19 titik, terealisasi 20 titik atau 100%;
- Persentase rekaman CCTV yang tersedia 24 jam/hari di 19 titik CCTV, target 19 titik, terealisasi 20 titik CCTV atau 100%.

d. Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika, dengan capaian indikator kinerja:
   - Tersedianya SOP tentang pelaksanaan E-government, target 1 SOP, terealisasi 100%.

4. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi, melaksanakan:

a. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang terintegrasi ke Pusat Data, dengan capaian indikatornya:
   - Tersedianya layanan public dan pemerintahan yang dilayani dengan aplikasi informatika, target 14 layanan, terealisasi 16 layanan atau 100%;
   - Tersedianya aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku, target 52 aplikasi, terealisasi 100%;
   - Tersedianya aplikasi informatika yang diimplementasikan, target 52 aplikasi, terealisasi 100%;
   - Persentase Uptime email batam.go.id, target 95%, realisasi 100%;
   - Tersedianya aplikasi informatika terintegrasi yang difasilitasi, target 3 aplikasi, realisasi 100%; Nama aplikasi :

     1. Aplikasi E-Government : sebagai system informasi pemerintah Kota Batam yang digunakan untuk melakukan pengelolaan, perencanaan, keuangan,asset, penatausahaan dan pengembangan modul untuk monitoring dan evaluasi keuangan daerah.

     2. Aplikasi PTSP-Online : aplikasi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM_PTSP) yang berisi pelayanan perizinan.

     3. Aplikasi E-Kinbang : aplikasi yang berisi sistem informasi kinerja pembangunan, bidang administrasi pembangunan yang digunakan untuk menginput perjanjian kinerja pertahun dan perjanjian kinerja per triwulan.

- Terlaksananya pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informaika, target 1 laporan, realisasi 100%.

b. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi, capaian kinerjanya:

- Terlaksananya beberapa titik lokasi terkoneksi jaringan internet/intranet,target 13 OPD, realisasinya 100%;
- Tingkat kepuasan pengguna layanan internet, target 60% terealisasi 100 %;
- Persentase titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK, target 33 titik, realisasinya 100%;
- Laporan OPD terhadap pelaksanaan inventarisasi TIK, target 1 laporan.
- Jumlah Bandwidth yang dikelola di lingkungan Pemko Batam, target 200 Mbps, realisasi 100%.
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) yang telah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sampai dengan tahun 2021.

5. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah.

Dengan 1(satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Metadata.

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar dari perencanaan pembangunan. Dinas Kominfo Kota Batam melalui bidang Statistik telah mampu mengumpulkan data sektoral dari seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam (capaian 100%). Data tersebut telah diolah dan tersedia dalam bentuk dokumen/ ***Buku Statistik Sektoral Kota Batam***.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Program yang menyelenggarakan urusan statistik yaitu :
Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan dengan capaian indikator kinerjanya yaitu :

Capaian Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah dicapai dengan melaksanakan **Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM** dengan capaian indikator kinerjanya yaitu :

1. Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan Enumerator data statistik sektoral, target 44 OPD, terealisasi 100%;
2. Jumlah Forum satu data Tingkat Kota Batam, target 2x pertemuan, terealisasi 100%;
3. Jumlah Diseminasi data dan informasi statistik sektoral, target 12x pertemuan, terealisasi 6x pertemuan dan 3x zoom meeting.

Tabel.2.2.4

Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Statistik TA.2020

NO	URAIAN	TARGET		REALISASI			
		FISIK	KEUANGAN (Rp.)	FISIK	%	KEUANGAN (Rp.)	%
1	Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah.						
a)	Kegiatan Pengelolaan Metadata statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM	1 data statistik sektoral (primer dan sekunder)	17.280.000,00	1 data statistik sektoral (primer dan sekunder)	100	13.905.000,00	100

Tabel 2.2.5.

Perkembangan Data Statistik Sektoral yang tersedia di Kota Batam Periode 2018-2020

NO	URAIAN	2018	2019	2020
1	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral	31	31	31
2	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Tersedia	5	5	31
3	Persentase Jenis Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan	16	100%	100%
4	Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dengan survey	-	1	2
5	Jumlah diseminasi data statistik sektoral	-	6 kali	9 kali

Tabel 2.2.6.

Capaian Target Indikator Kinerja Statistik TA.2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah (statistik)	100%, Uraiannya: - 31 data statistik sektoral yang diolah dan dianalisis, - 1 dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistik sektoral, - 2 data terkumpul melalui kerjasama antar instansi, - 12x desiminasi data statistik sektoral, - 31 data statistik sektoral yang tersedia dari seluruh OPD.	100%	100%

Tabel 2.2.7.

Prestasi Yang Telah di Raih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam selama Tahun 2020.

1.	Media Centre Pemerintah Kota Batam yang merupakan portal yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Meraih Juara 3 kontribusi aktif dalam pemberitaan kategori kabupaten/kota dari 163 Media Centre se-Indonesia (juara 3 Nasional).
2.	Kominfo membuat Aplikasi JDIH Pemko dan DPRD untuk penginputan semua jenis produk hokum yang ada di lingkungan Kota Batam, pembuatan kedua aplikasi tersebut sesuai format Standar Pengelolaan JDIH Kemenhukumham Nomor 8 Tahun 2019. Selain pembuatan website yang tersimpan dalam server Diskominfo, Kominfo juga berhasil mengintegrasi kedua website tersebut ke JDIH Nasional di bawah Badan Pengelolaan Hukum nasional (BPHN). Pada penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI, Batam menjadi Kota

	terbaik I dan terbaik II untuk kategori DPRD.
3.	Diskominfo terlibat dalam pelaporan tahunan pada Alpikasi E-Reporting yang dikelola BPHN dan Inovasi –inovasi yang ada di JDIH Kota Batam seperti Majalah Digital.
4.	Pemko Batam mendapatkan Juara Favorit pada lomba Video Inovasi daerah dalam penyiapan Tatanan Norma baru Produktif dan aman Covid-19 dimana video tersebut disiapkan oleh Tim Diskominfo sehingga memperoleh tambahan anggaran DID.
5.	Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Batam tahun 2020 meningkat menjadi 3,11 dengan kategori "Baik" dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 2,23 dan masuk dalam kategori "cukup".

Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Batam tahun 2020, bahkan lebih tinggi dari indeks rata-rata nasional. Indeks ini berdasarkan penilaian dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

BIDANG PENYELENGGARAAN EGOVERNMENT DAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Sampai dengan Tahun 2020 untuk mendukung aktifitas informasi dan komunikasi di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melayani penyediaan jaringan internet dan intranet di 33 titik lokasi dari 13 OPD, sebagaimana tabel tersebut dibawah ini;

Tabel 2.2.8
Jaringan internet dan intranet Pemko Batam Tahun 2016 – Tahun 2020.

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Internet	22 OPD	25 OPD	25 OPD	25 OPD	13 OPD
2	Intranet	22 OPD	25 OPD	25 OPD	25 OPD	13 OPD

Sumber Bidang PE

Namun untuk Tahun Anggaran 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tidak menganggarkan kegiatan pembangunan jaringan internet yang baru. Selain itu, Pemerintah Kota Batam memiliki Situs resmi yang dapat diakses pada alamat batam.go.id. Selain halaman utama, juga terdapat 132 sub domain yang dipergunakan oleh beberapan aplikasi yang dikelola oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Tabel 2.2.9
Website Milik Pemerintah Kota Batam Tahun 2016 – Tahun 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Website Pemerintah Batam batam.go.id	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Sub domain	185	213	128	142	132

Sumber Bidang PE

Pada Tahun 2020 terdapat penurunan Sub Domain dari 142 menjadi 132 disebabkan perubahan metode perhitungan.

Pemutakhiran data maupun informasi pada Website resmi Pemerintah Kota Batam domain batam.go.id merupakan salah satu implementasi dari keterbukaan informasi publik, pemerintah Kota Batam menjalin komunikasi dengan warga melalui website resmi milik Pemerintah Kota Batam yaitu www.batam.go.id. Dalam website tersebut warga Batam dapat melakukan berbagai macam aktifitas seperti memperoleh informasi tentang pembangunan dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam serta menyalurkan aspirasi berupa pengaduan dan mengajukan usulan pembangunan untuk tahun berikutnya.

Jumlah Kunjungan rata-rata per bulan ke website pada tahun 2020, sebanyak 13.743.274 kunjungan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2.10
Rata-rata Kunjungan per Bulan pada situs Pemerintah Kota Batam Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata kunjungan website per bulan	301.402	342.960	423.980	213.722	13.743.274

Sumber Bidang PIPP

Pada tahun 2020 terdapat peningkatan yang sangat jauh disebabkan perubahan metode perhitungannya. Pada tahunn 2019 perhitungan jumlah pengunjung dan pengguna menggunakan skrip *"javascript"* yang dapat di nonaktifkan oleh antitracivy pada perambun modern. Pengunjung dihitung dari jumlah hitungan yang didapat dari log web server dengan memanfaatkan aplikasi Go Acces.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Batam membangun aplikasi layanan publik berbasis TIK yang

tersebar di OPD Pemerintah Kota Batam. Jumlah aplikasi layanan publik berbasis TIK yang dibangun pada tahun 2020 berjumlah 52 aplikasi.

Perkembangan jumlah aplikasi layanan publik berbasis TIK yang dibangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.11

Layanan Publik berbasis TIK Kota Batam
Tahun 2017 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK	5	54	137	140	12
2	Jumlah Layanan Publik	21	97	137	140	12
3	Persentase Layanan Publik Berbasis TIK	24	56	100	100	100

Sumber Bidang PE

Pada tahun 2020 (table 10), terjadi penurunan jumlah layanan public dan layanan publik berbasis TIK disebabkan perubahan cara pengukuran capaian, dimana yang di ukur adalah jenis/kategori layanan berdasarkan Perpres SPBE.

Layanan Publik berbasis TIK diatas dikembangkan ke arah berbasis web dengan maksud mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik berbasis TIK yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Batam. Dalam perkembangannya dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Batam sebanyak 4.732.559 seperti yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.12a.
Jumlah pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui web
Kota Batam Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK	2.798	8.722	4.451	4.732.559
2	Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui Web	2.215	2.798	8.722	4.732.559
3	Persentase Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui Web	100	100	100	100

Sumber Bidang PE

Peningkatan yang sangat jauh disebabkan perubahan metode perhitungannya. Pada tahun 2019 perhitungan jumlah pengunjung dan pengguna menggunka skrip "javascript" yang dapat dinonaktifkan oleh antitracivy pada perambun modern. Untuk tahun 2020, pengunjung dihitung dari jumlah hitungan yang didapat dari log web server dengan memanfaatkan aplikasi Go Acces.

BIDANG STATISTIK

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar dari perencanaan pembangunan.

Dinas Kominfo Kota Batam melalui bidang Statistik telah mampu mengumpulkan data sectoral dari seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam (capaian 100%). Data tersebut telah diolah dan tersedia dalam bentuk dokumen/ ***Buku Statistik Sektoral Kota Batam***.

Tabel 2.2.12b.
Presentase Data Statistik Sektoral yang tersedia
di Kota Batam Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral	31	31	31	31
2	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Tersedia	5	5	31	31
3	Persentase Jenis Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan	16	16	100%	100%
4	Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dengan survey		-	1	2
5	Jumlah diseminasi data statistik sektoral		-	6 kali	9 kali

Sumber: Bidang Statistik Sektoral

Pada tahun Anggaran 2020, target data statistik sektoral dan data statistik yang tersedia tetap 31.

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERSANDIAN (PIPP)

Persandian merupakan bagian dari Bidang PIPP dan tambahan urusan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Persandian didaerah Kabupaten/Kota meliputi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota NSPK bidang persandian lainnya : bidang SDM, sarana dan prasana dll Kurang/lebih : 25 NSPK, selanjutnya Surat Edaran Kominfo No.05/SE/M.Kominfo/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Kehadiran Bidang Persandian untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah, melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawananan pada Sistem Informasi di Pemerintah Daerah dan melakukan kegiatan Assessment Keamanan Sistem Informasi secara mandiri.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan pengamanan komunikasi dan informasi yang berklasifikasi sejak tahun 2017 dan jenis layanan persandian Kota Batam sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.2.13
Layanan Persandian di Kota Batam sampai dengan Tahun 2020

NO	LAYANAN
1	Kirim Terima Berita
2	Counter surveilance
3	Penetration Test
4.	Signal Jamming
5.	Audit Keamanan Informasi
6.	Sertifikasi Elektronik
7.	Sosialisasi Kesadaran Keamanan

Sumber Bidang Persandian

Tabel 2.2.14
Capaian Kinerja Bidang Persandian Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	OPD yang menerapkan sistem pengamanan informasi pada level V	-	-	1	2
2	% pegawai yang memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi dengan kategori baik	0.33%	1.36% (kumulatif)	1,36% (kumulatif)	1,36% (kumulatif)
3	Sistem elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik	-	-	1 sistem dalam proses	
4	% OPD yang memanfaatkan layanan persandian unuk mengamankan elektronik	-	-	1 OPD	2 OPD
5	Jumlah kegiatan penting yang diamankan dengan persandian	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan
6	% infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi	-	2.08%	2.08%	2.08%

Sumber: Bidang Persandian

Selain itu keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam melalui Bidang Persandian adalah adanya dukungan penuh dari ***Badan Siber dan Sandi Negara dalam Pengembangan Persandian di daerah***

Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kota Batam sampai dengan triwulan II Tahun 2021 berbanding dengan target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, sebagaimana tabel dibawah ini T-C.30 dibawah ini;

Tabel T-C.30.-2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Batam
Periode Tahun 2019 sampai dengan TW.II. 2021

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
	1.Persentase data Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terintegrasi			68%	72%	77%	68%	68%	72,73%	72,73%	72,73%	
	2.Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang memanfaatkan teknologi Informasi			63%	63%	68%	63%	63%	72,73%	72,73%	72,73%	
	3.Persentase Perangkat Daerah yang Telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.			10%	15%	20%	10%	10,69%	10,69%	20%	20%	
	4.Nilai Keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota			89	87,4	90%	88,6	nihil ('-Kegiatan Penilaian Komisi Informasi Provinsi Kepri untuk seluruh Kab/Kota se Kepri, anggaran kegiatannya dialihkan ke penanganan Covid-19 '-Tahun 2019, Kominfo Kota Batam mendapat Nilai 87,4)	(Penilaian Akhir Tahun)	89,5	89,5	
	5.Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan Informasi			80%	85%	85%	80%	80%	85%	86,4%	85%	
	6.Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah			100%	100%			100%	100%			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuab dibidang Komunikasi dan Informatika daerah sesuai kewenangannya.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong atau permasalahan dan solusi yang diinginkan terkait kegiatan Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam:

Tabel 2.3.1
Faktor-faktor penghambat dan pendorong atau permasalahan dan solusi:

No.	URAIAN		KETR
	PERMASALAHAN	SOLUSI	
1.	Belum adanya Rencana induk, Arsitektur dan kebijakan SPBE yang berperan atas perencanaan, anggaran, penyelarasan, penyiapan,implementasi dan wvaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.	Menyusun Rencana Induk, Arsitektur dan Kebijakan SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Batam.	
2.	Pengelolaan penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah yang belum terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika seperti akses internet dan infrastruktur pendukungnya.	Melakukan koordinasi bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Batam terkait penyelnggaraan sistem jaringan intra dan sistem komunikasi intra Daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dimasukkan secara bertahap kedalam Rencana Strategis Kota Batam dalam 5 tahun ke depan.	
3.	Pergantian pejabat struktural (Sekretaris) yang menjabat sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pembantu (sesuai Perwako No. 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perwako No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam) Tahun 2021 sudah di usulkan kegiatannya, dikarenakan keterbatasan anggaran dan adanya pandemic covid-19 sehingga usulan tersebut belum disetujui.	Diusulkan kembali bimbingan teknis PPID untuk PPID pembantu dengan narasumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.	

	Kurangnya kemampuan mengembangkan tusi dalam hal penjabaran statistik sektoral	Mengikutsertakan SDM Bidang Statistik dalam pelatiahan, Diklat maupun bimtek Statistik;	
	Belum adanya SDM yang menguasai keilmuan statistik;	Mengusulkan formasi kebutuhan ASN yang berlatar belakang keilmuan statistik ke BKPSDM Kota Batam;	
	Pengumpulan dan Pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemko Batam belum belum terlaksana secara optimal.	Membangun portal/aplikasi pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data statistik sektoral.	
	Kerjasama antar instansi dan diseminasi data statistik sektoral belum terlaksana secara optimal	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD serta instansi vertikal yang ada di daerah melalui Perjanjian Kerjasama (MOU) dan Optimalisasi Forum Satu Data Tingkat Daerah. Mengoptimalkan publikasi statistik sektoral melalui layanan digital pemerintah, maupun media propaganda, promosi dan iklan.	

Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kota Batam sampai dengan triwulan II Tahun 2021 berbanding dengan target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, sebagaimana tabel dibawah ini T-C.30 dibawah ini

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Tahun 2021 tidak memiliki usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang maupun Pokir Dewan).

EVALUASI RKPD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

TAHUN 2021

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Target Dana RKPD	Realisasi Dana T1	Realisasi Kinerja T1	Realisasi Dana T2	Realisasi Kinerja T2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	13.415.000	0	-	0
2	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	397.873.000	79	3.250.724.058	0
3	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	21.050.000	815	-	0
4	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	21.050.000	815	-	0

5	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	11.048.600	3	39.546.247	0
6	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	11.048.600	3	39.546.247	0
7	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	19.463.976	1	25.536.024	0
8	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	19.463.976	1	25.536.024	0
9	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	9.440.000	302	15.016.500	0
10	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	9.440.000	302	15.016.500	0

11	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	13.415.000	0	-	0
12	0.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	7.808.511.300	397.873.000	79	3.250.724.058	0
13	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	75. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	3.184.150	14	-	0
14	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	75. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	3.184.150	14	-	0
15	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	75. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	-	0	42.000.000	0

16	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	75. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	-	0	42.000.000	0
17	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	75. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	-	0	96.480.000	0
18	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	75. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	-	0	96.480.000	0
19	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	76. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	12.997.950	7	50.142.950	0
20	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	76. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	65.023.500	835	20.000.000	0

21	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	76. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	65.023.500	835	20.000.000	0
22	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	76. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	18.388.000	21	55.364.000	0
23	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	76. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	12.997.950	7	50.142.950	0
24	0.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	76. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	548.567.980	18.388.000	21	55.364.000	0
25	1.02.10.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	01. Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	81,25	Indeks	5.397.688.080	868.972.078	274	1.405.882.356	412

26	1.02.10.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	01. Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	81,25	Indeks	5.397.688.080	868.972.078	274	1.405.882.356	412
27	1.02.10.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	03. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	150	Kali	1.324.650.760	150.364.760	2	202.476.539	27
28	1.02.10.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	03. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1218	Publisitas	5.397.688.080	119.592.444	6	161.990.736	7
29	1.02.10.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	03. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1218	Publisitas	5.397.688.080	119.592.444	6	161.990.736	7
30	1.02.10.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	03. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	150	Kali	1.324.650.760	150.364.760	2	202.476.539	27

31	1.02.10.16. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	04. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	100	Persentase	2.456.655.000	154.772.738	112	873.551.450	15
32	1.02.10.16. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	04. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	100	Persentase	2.456.655.000	154.772.738	112	873.551.450	15
33	1.02.14.15. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Kelengkapan Data SIPD Kota Batam	02. Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	2	Dokumen	13.030.000	255	17	255.000	23
34	1.02.14.15. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah	3.Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Kelengkapan Data SIPD Kota Batam	02. Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	2	Dokumen	13.030.000	255	17	255.000	23

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Pemetaan Program Kegiatan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 (lima) Program kegiatan , dengan rincian Tabel sebagaimana dibawah ini;

HASIL PEMETAAN KEGIATAN (BELANJA LANGSUNG) TAHUN 2021 KE DALAM PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	RENJA BERDASARKAN PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010		RENJA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019								
			Sub Kegiatan		Kegiatan		Program		URUSAN		Keterangan/
	PROGRAM	KEGIATAN	No	Uraian	Kode	Uraian	Kode	Uraian	Kode	Uraian	Permasalahan
1	2	3	3	4	5	6	7	8			10
1		Belanja Gaji dan Tunjangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
I	**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**										
1		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	OPD, UPTD, Satuan Pendidikan (Sekolah)
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	OPD, UPTD, Satuan Pendidikan (Sekolah)
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	OPD, UPTD, Satuan Pendidikan (Sekolah)
			6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			7	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	OPD, UPTD, Satuan Pendidikan (Sekolah)
			8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	OPD, UPTD, Satuan Pendidikan (Sekolah)

II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**										
1		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.16.01.2.03	Administrasi Umum	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

III	**Program : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi**										
1		Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data	14	Pengembangan Aplikasi dan Proses BisnisPemerintahan Berbasis Elektronik	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			15	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2		Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	16	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

			15	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			17	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
IV	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**										
1		Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	18	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**2.16.02**	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			19	Layanan Hubungan Media	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi		Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

2			20	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	21	Pelayanan Informasi Publik	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			20	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
4		Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam	16	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Kegiatan Pembangunan Jaringan CCTV di Kota Batam	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

						Kabupaten/Kota					
5		Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	23	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah										
		Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	

TABEL:3.1.

RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN/SKPD/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN						Keterangan	Catatan Perubahan
	Murni 2021	Rancangan KUA PPAS	Bertambah/Berkurang Murni dan KUA PPAS	PAGU TAPD		Bertambah/Berkurang TAPD dan KUA PPAS		
	Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp		
Total ANGGARAN	**19.504.764.666**	**18.586.046.743**						
URUSAN KOMINFO dan URUSAN PENUNJANG	19.491.734.666	18.509.198.743	(982.535.923)	(5,04)	18.671.127.743	161.929.000	SKPD	
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.408.349.826	7.425.813.903	(982.535.923)	(11,69)	7.587.742.903	(161.929.000)	PROGRAM	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.237.010.546**	**6.450.655.623**	**(786.354.923)**	**(10,87)**	**6.629.496.623**	**(178.841.000)**	**KEGIATAN**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.185.740.546	6.396.665.623	(789.074.923)	(10,98)	6.575.506.623	(178.841.000)	SUB KEGIATAN	Anggaran TKD 13 dan TKD 14 tidak jadi dibayarkan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.270.000	53.990.000	2.720.000	5,31	53.990.000	-	SUB KEGIATAN	Honor BPP di APBD hanya dianggarkan 11 bulan. Di APBD P ditambahkan 1 bulan lagi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**622.771.300**	**426.590.300**	**(196.181.000)**	**(31,50)**	**396.308.300**	**30.282.000**	**KEGIATAN**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.368.300	6.368.300	-	-	6.368.300	-	SUB KEGIATAN	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.916.000	91.916.000	-	-	91.916.000	-	SUB KEGIATAN	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.980.000	109.980.000	-	-	84.735.000	**25.245.000**	SUB KEGIATAN	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.050.000	21.050.000	-	-	21.050.000	-	SUB KEGIATAN	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.457.000	197.276.000	(196.181.000)	(49,86)	192.239.000	**5.037.000**	SUB KEGIATAN	Rasionalisasi Anggaran SPPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**286.763.500**	**286.763.500**	**-**	**-**	**286.763.500**	**-**	**KEGIATAN**	
Pengadaan Mebel	45.600.000	45.600.000	-	-	45.600.000	-	SUB KEGIATAN	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	241.163.500	241.163.500	-	-	241.163.500	-	SUB KEGIATAN	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**104.072.480**	**104.072.480**	**-**	**-**	**104.072.480**	**-**	**KEGIATAN**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.214.000	19.214.000	-	-	19.214.000	-	SUB KEGIATAN	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.858.480	84.858.480	-	-	84.858.480	-	SUB KEGIATAN	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**157.732.000**	**157.732.000**	**-**	**-**	**171.102.000**	**(13.370.000)**	**KEGIATAN**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.142.000	87.142.000	-	-	100.512.000	**(13.370.000)**	SUB KEGIATAN	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.590.000	70.590.000	-	-	70.590.000	-	SUB KEGIATAN	
2.PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**6.722.335.840**	**6.722.335.840**	**-**	**-**	**6.722.335.840**	**-**	**PROGRAM**	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**6.722.335.840**	**6.722.335.840**	**-**	**-**	**6.722.335.840**	**-**	**KEGIATAN**	

Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4.980.223.680	4.980.223.680	-	-	4.980.223.680	-	SUB KEGIATAN	
Pelayanan Informasi Publik	536.692.800	536.692.800	-	-	536.692.800	-	SUB KEGIATAN	
Layanan Hubungan Media	417.464.400	417.464.400	-	-	417.464.400	-	SUB KEGIATAN	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	787.954.960	787.954.960	-	-	787.954.960	-	SUB KEGIATAN	
3.PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**4.361.049.000**	**4.361.049.000**	**-**	**-**	**4.361.049.000**	**-**	**PROGRAM**	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**2.456.655.000**	**2.456.655.000**	**-**	**-**	**2.456.655.000**	**-**	**KEGIATAN**	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.456.655.000	2.456.655.000	-	-	2.456.655.000	-	SUB KEGIATAN	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1.904.394.000**	**1.904.394.000**	**-**	**-**	**1.904.394.000**	**-**	**KEGIATAN**	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	257.994.000	257.994.000	-	-	257.994.000	-	SUB KEGIATAN	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.646.400.000	1.646.400.000	-	-	1.646.400.000	-	SUB KEGIATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**13.030.000**	**11.005.000**	**(2.025.000)**	**(15,54)**	**11.005.000**	**-**	**BIDANG**	
URUSAN STATISTIK	**13.030.000**	**11.005.000**	**(2.025.000)**	**(15,54)**	**11.005.000**	**-**	**SKPD**	
4.PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**13.030.000**	**11.005.000**	**(2.025.000)**	**(15,54)**	**11.005.000**	**-**	**PROGRAM**	Anggaran Konsumsi acara diseminasi data statistik tidak dipakai karena dilaksanakan secara online

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**13.030.000**	**11.005.000**	**(2.025.000)**	**(15,54)**	**11.005.000**	-	**KEGIATAN**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	13.030.000	11.005.000	(2.025.000)	(15,54)	11.005.000	-	SUB KEGIATAN	
URUSAN PERSANDIAN	-	**65.843.000**	**65.843.000**		**65.793.001**	**49.999**	**SKPD**	
5.PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	**65.843.000**	**65.843.000**		**65.793.001**	**49.999**	**PROGRAM**	Pelaksanaan kegiatan dan konsultasi untuk IT Security Assessment
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	**65.843.000**	**65.843.000**		**65.793.001**	**49.999**	**KEGIATAN**	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		65.843.000	65.843.000		65.793.001	**49.999**	SUB KEGIATAN	

Sebagaimana Tabel Perubahan Plafon Pagu Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 diatas dan sesuai jadwal penyusunan Rencana Kegiatan APBD-P TA. 2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang menyelenggarakan 3(tiga) urusan Pemerintah Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan penyelenggaraan persandian, namun urusan penyelenggaraan **persandian belum teranggarkan pada APBD Murni**, sehingga harus dianggarkan pada saat perubahan APBD Tahun 2021. Selain itu yang perlu dilakukan perubahan/perbaikan terhadap beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain:

1. Diperlukan tambahan anggaran honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) pada APBD-P TA. 2021 sebanyak 1(satu) bulan, dikarenakan pada APBD 2021 hanya dianggarkan 11(sebelas) bulan.
2. Mengusulkan Perpindahan rekening Belanja Sewa Peralatan Personal Computer pada rekening belanja Sewa Aplikasi Call Centre 112 menjadi Belanja Sewa Peralatan Jaringan.
3. Mengusulkan Perubahan besaran Belanja pada Rekening Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Mengusulkan Perubahan Anggaran Belanja pada Rekening Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

BAB V.
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dilaksanakan tahunan yang merupakan titik awal pelaksanaan program dan kegiatan OPD berguna sebagai pedoman dalam mencapai capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Pembanguan Jangka Menegah Daerah RPJMD 2016-2021. Dokumen Rancangan Renja memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Perubahan Renja (P-Renja) OPD adalah bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara subtansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Perubahan Renja (P-Renja) Tahun 2021 mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan OPD pada tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang berarti dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Renja ini dirasa jauh dari kesempurnaan, diharapkan adanya masukan, kritikan yang bisa memperbaiki pembuatan Renja- renja dimasa yang akan datang.

Batam, 09 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATAM

AZRIL APRIANSYAH.ST.MT
Nip. 19730408 200212 1005

CHECK List Kelengkapan Bahan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH :

No	Bahan	Keterangan
1.	Rancangan Akhir Renja PD yang telah ditandatangani	Ada/~~Tidak Ada~~
2.	SK Tim PenyusunanRenja PD	Ada/~~Tidak Ada~~
3.	Formulir E.70	Ada/~~Tidak Ada~~
4.	Hasil Pemetaan Rencana Kerja Tahun 2020 sesuai dengan Permendagri 90/2019	Ada/~~Tidak Ada~~
5.	Renja Hasil cetak SIPD	Ada/~~Tidak Ada~~

REKOMENDASI

Batam, ...2021

PERANGKAT DAERAH	Bapelitbangda
Jabatan	Kasubid .....
NAMA	NAMA

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Batam

No	JenisKegiatan	HasilPengendaliandanEvaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

Batam, 09 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

AZRILAPRIANSYAH.ST.MT
NIP. 19730408 200212 1 005